



IMPLEMENTASI PROGRAM STUNTING DI BANGGAI LAUT (STUDI KASUS DI KECAMATAN BANGGAI SELATAN)

Sri Astuti Suprianto¹, Sri Yulianty Mozin²

Jurusan Administrasi Publik

Universitas Negeri Gorontalo

e-mail: sriasthuti123@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program penurunan stunting di Kabupaten Banggai Laut, dengan fokus pada Kecamatan Banggai Selatan. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berkontribusi terhadap stunting di daerah ini termasuk kurangnya asupan gizi yang memadai dan masalah kesehatan lainnya. Melalui analisis situasi program penurunan stunting, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat membantu pemangku kebijakan dalam merancang program yang lebih efektif dan efisien untuk mengatasi masalah stunting di Kabupaten Banggai Laut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya penurunan angka stunting, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi yang baik bagi pertumbuhan anak. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang kesehatan masyarakat dan gizi.

Kata Kunci: penurunan stunting, balita, implementasi program, Kecamatan Banggai Selatan, kesadaran masyarakat.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the stunting reduction program in Banggai Laut Regency, focusing on Banggai Selatan District. This research uses a qualitative descriptive method through observation, interviews, and documentation. The study results indicate that factors contributing to stunting in this area include lack of adequate nutritional intake and other health problems. Through a situational analysis of the stunting reduction program, this study aims to provide recommendations that can help policymakers design more effective and efficient programs to address stunting problems in the Banggai Laut Regency. This study is expected to provide a significant contribution to efforts to reduce stunting rates, as well as increase public awareness of the importance of good nutrition for child growth. This study is also expected to be a reference for further research in the field of public health and nutrition.

Keywords: *stunting reduction, toddlers, program implementation, South Banggai District, public awareness.*

PENDAHULUAN

Stunting adalah kegagalan tumbuh kembang yang menyebabkan gangguan pertumbuhan linear pada balita karena kekurangan nutrisi selama periode yang lama, mulai dari masa kehamilan hingga usia 24 bulan. Kekurangan gizi pada masa tumbuh kembang anak di usia dini akan menghambat perkembangan fisik, meningkatnya kesakitan, menghambat perkembangan mental anak, dan bahkan menyebabkan kematian. Balita yang mengalami masalah gizi stunting memiliki risiko terjadinya penurunan kemampuan intelektual, produktivitas, dan kemungkinan risiko mengalami penyakit degeneratif di masa mendatang (Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan, 2018).

Indonesia mengalami masalah gizi yang signifikan dalam beberapa waktu terakhir, maka dari itu perhatian pemerintah terhadap masalah kesehatan telah meningkat. Saat ini, masalah gizi utama adalah status anak balita pendek, atau stunting. Hasil penelitian kesehatan dasar tahun 2013 menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia sebesar 37,20%. Angka tersebut kemudian

meningkat menjadi 27,50% berdasarkan pantauan Status Gizi tahun 2016, yang merupakan persentase stunting yang cukup tinggi karena batasan persentase stunting menurut WHO adalah <20%. Ini menunjukkan bahwa 1/3 anak yang hidup di bawah garis kemiskinan.

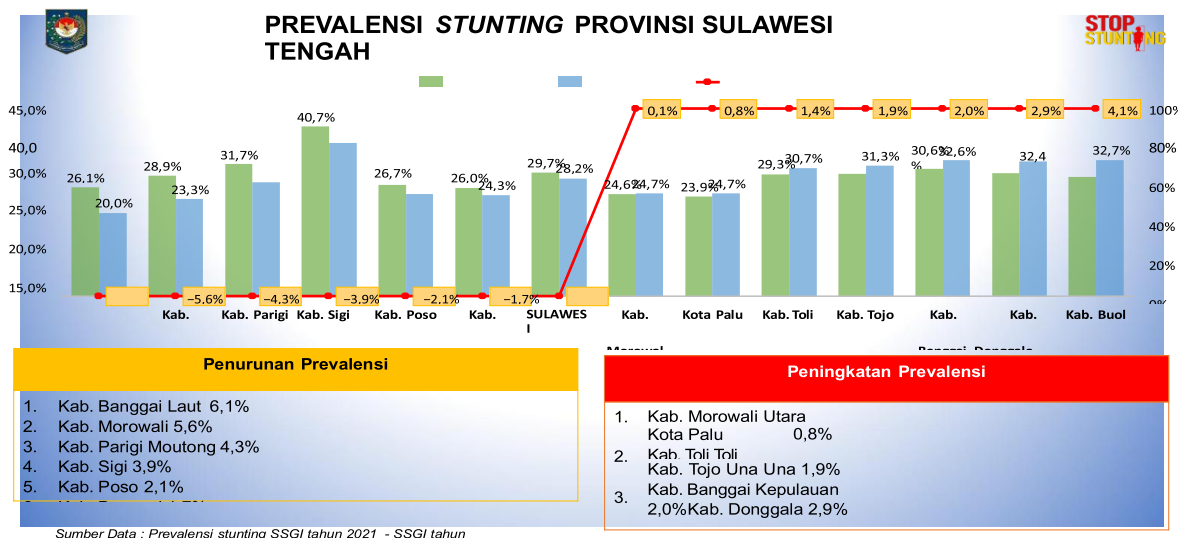
UNICEF mengatakan stunting adalah ketika anak-anak di bawah lima tahun mengukur tingginya menggunakan standar pertumbuhan anak yang ditetapkan oleh WHO. Hasil dengan tinggi badan di bawah minus 3 disebut stunting berat atau sedang, dan tinggi badan di bawah minus 3 disebut stunting kronis. Status anak yang mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang disebabkan oleh kekurangan gizi dan infeksi berulang disebut stunting. Stunting dapat diidentifikasi dengan tinggi badan yang tidak sesuai dengan standar atau di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab atas urusan kesehatan pemerin tah (Peraturan Presiden, 2021).

Menurut Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021, pasal 2 ayat 2, strategi nasional percepatan penurunan stunting bertujuan untuk mengurangi prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, dan meningkatkan ketersediaan air minum dan sanitasi. Selain itu, kelompok sasaran penurunan stunting termasuk remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0 (nol) hingga 59 bulan. Pemerintah pusat melakukan upaya untuk mengurangi angka stunting dengan membentuk tim percepatan penurunan stunting di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, dan desa. Tim percepatan penurunan stunting tingkat nasional diketuai oleh Wakil Presiden Indonesia dan wakil ketua, dan terdiri dari 1) bidang pelaksanaan, 2) bidang perencanaan, pemantauan, dan evaluasi, dan 3) bidang pembinaan dan penyelenggaraan pengawasan pemerintah daerah (Peraturan Presiden 2021). Berdasarkan peraturan dan program penurunan stunting yang sudah dilakukan sejak tahun 2013 menunjukkan bahwa terjadi penurunan stunting di Indonesia yang dilihat dari data yang dipaparkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan bahwa stunting yang ada di Indonesia pada tahun 2013 sebesar 37,20% dan terus terjadi penurunan yang cukup besar yaitu 12,80% dalam kurun waktu 8 tahun sampai pada tahun 2021 menjadi 24,40%. Namun angka persentase stunting ini masih tergolong cukup besar menurut ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 yaitu target penurunan stunting harus mencapai 14% pada tahun 2024. Penurunan stunting ini tidak terlepas dari pantauan pemerintah dan harus terus membuat program-program penurunanyo stunting yang dimulai dari pemerintah provinsi, kabupaten, dinas terkait, camat, penghulu, tim PKK dan partisipasi masyarakat agar penurunan stunting dapat tercapai.

Penurunan stunting ditetapkan sebagai program prioritas nasional yang harus dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Untuk mendukung terintegrasinya pelaksanaan intervensi penurunan stunting di kabupaten/kota, maka pedoman pelaksanaan intervensi penurunan stunting Terintegrasi di Kabupaten/Kota, yang bertujuan untuk menjadi panduan bagi kabupaten/kota dalam melaksanakan intervensi penurunan stunting terintegrasi mulai dari menganalisis situasi program penurunan stunting, menyusun rencana kegiatan, pembinaan kader pembangunan manusia, sistem manajemen data stunting dan pengukuran publikasi data stunting. Provinsi dapat menggunakan pedoman ini untuk mengawasi dan membina kabupaten/kota untuk melaksanakan intervensi penurunan stunting terintegrasi yang lebih efektif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Provinsi Sulawesi Tengah adalah salah satu provinsi yang memiliki prevalensi stunting lebih tinggi dibandingkan prevalensi stunting secara nasional, Provinsi Sulawesi Tengah menduduki peringkat 8 sebagai provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi di Indonesia. Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) mencatat prevalensi stunting Provinsi Sulawesi Tengah adalah 29,7 persen pada tahun 2021. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah merencanakan Gerakan Cepat

Komitmen Bersama Penurunan Stunting Terintegrasi Penurunan Kemiskinan. Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 menunjukkan adanya penurunan stunting di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 1 persen dari tahun 2022, dari 28.2 persen menjadi 27.2 persen. Hasil ini menjadikan Sulteng sebagai salah satu dari 18 provinsi yang mengalami penurunan prevalensi stunting se-Indonesia. Namun angka ini masih di atas Prevelansi nasional yaitu 21,6%. Adapun grafik prevelansi stunting di Provinsi Sulawesi Tengah.



Gambar 1.1 Grafik Prevelansi Stunting Provinsi Sulawesi Tengah

Sumber Data: Laporan Provinsi Sulawesi Tengah

Namun persentase ini masih jauh dari ketentuan yang ditetapkan di dalam Peraturan Presiden bahwa stunting harus berada pada angka 14%. Ini menjadi sebuah permasalahan yang harus diselesaikan, maka pemerintah Provinsi harus lebih giat lagi dalam membuat program dan melakukan kegiatan penurunan stunting. Ada 13 Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah dan turut melaksanakan program penurunan stunting sebagaimana dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Prevelensi Stunting Kab/Kota Provinsi Sulawesi Tengah

No	Kabupaten/Kota	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Banggai	17.9 %	26 %	24.3 %
2	Banggai Kepulauan	23 %	30.6 %	32.6 %
3	Banggai Laut	20.8 %	26.1 %	20 %
4	Morowoli	7.6 %	28.9 %	23.3 %
5	Poso	16.8 %	26.7 %	24.6 %
6	Donggala	27.1 %	29.5 %	32.4 %
7	Toli-Toli	9.8 %	29.3 %	30.7 %
8	Buol	11.7 %	28.6 %	32.7 %
9	Parigi Moutong	11.4 %	31.7 %	27.4 %
10	Tojo Una-Una	22.7 %	29.4 %	31.3 %
11	Sigi	19 %	40.7 %	36.8 %
12	Morowali Utara	17.4 %	24.6 %	24.7 %



13	Palu	14 %	23.9 %	24.7 %
----	------	------	--------	--------

Sumber: Prevelensi stunting SSGI tahun 2019-tahun 2022

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat dari 13 Kabupaten atau kota yang berada di Provinsi Sulteng, Kabupaten Banggai Laut memiliki prevelensi stunting yang masih tinggi. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 1% menjadi 20.8% Setelah itu pada tahun 2021 prevelensi stunting mengalami peningkatan drastis 5,3% menjadi 26.1% , setelah itu pada tahun 2022 prevelensi stunting mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 6.1% menjadi 20%. Hal ini harus diperhatikan agar pertahanan dalam penurunan stunting dapat berlanjut dengan baik dan hal ini merupakan persoalan yang harus diseriusi oleh pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

Persentase dari Data Balita Pendek dan Sangat Pendek (Stunting) di semua Puskesmas yang ada di Kabupaten Banggai Laut dapat kita lihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.2 Data Balita Pendek dan Sangat Pendek (Stunting) Kabupaten Banggai Laut Tahun 2024

No	Puskesmas	TB/U					
		Sangat Pendek	Pendek	Normal	Tinggi	Jumlah Balita yang di Ukur	Stunting
1	Lantibung	16	33	409	2	460	49
2	Dutabusara	5	14	193	-	212	19
3	Lipulalongo	13	56	344	-	413	69
4	Lokotoy	11	16	506	-	533	27
5	Banggai	10	34	1.461	11	1.516	44
6	Banggai Timur Raya	5	14	366	-	385	19
7	Adean	8	36	661	-	705	44
8	Banggai Selatan	5	17	563	1	586	22
9	Bungin	43	62	595	7	707	105
10	Tikson Raya	3	17	129	-	149	20
JUMLAH		119	299	5.227	21	5.666	418

Sumber: e-PPGBM bulan Agustus Tahun 2024

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat dari 10 Puskesmas yang berada di Provinsi Kabupaten Banggai Laut memiliki prevelensi stunting yang masih tinggi. Puskesmas Kecamatan Banggai Selatan peringkat ke-7 dari 10 puskesmas Kecamatan yang ada di Kabupaten Banggai Laut. Pemerintah Provinsi harus lebih giat lagi dalam membuat program dan tindakan penurunan stunting karena masalah ini masih perlu ditangani.

Alokasi Anggaran Kegiatan Program Percepatan Penurunan Stunting di 13 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah

Kabupaten/kota	2022
Kota Palu	70.680.983.296
Kab. Sigi	22.132.364.040
Kab. Donggala	39.439.502.742
Kab. Parigi Moutong	67.567.810.549
Kab. Poso	40.660.140.027
Kab. Tojo Una-Una	37.031.686.301
Kab. Banggai	14.366.525.000
Kab. Banggai Laut	18.570.588.714
Kab. Banggai Kepulauan	24.052.066.603
Kab. Morowali	61.869.234.202
Kab. Morowali Utara	24.142.161.314
Kab. Tolitoli	13.581.660.200
Kab. Buol	4.385.267.208
J U M L A H	438.479.990.196

Gambar 1.2 Alokasi Anggaran Program Stunting

Sumber Data: Laporan Provinsi Sulawesi Tengah

Salah satu Rincian alokasi anggaran dari Kabupaten Banggai Laut yaitu dalam bidang kesehatan dan keluarga berencana mengungkapkan total alokasi sebesar RP. 18.570.588.714. Dari anggaran tersebut disalurkan dalam penguatan layanan dipuskesmas, penguatan pada rumah sakit dan kegiatan-kegiatan yang tercantum meliputi penguatan layanan maternal neonatal, seperti penyediaan layanan ultrasonografi (USG) dan alat surveilans gizi. Di sisi lain, sub-bidang menekankan pada penguatan kapasitas RS Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) dengan penyediaan berbagai alat kesehatan yang diperlukan.

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa data prevalensi stunting dari tahun ketahun naik turun. Kabupaten Banggai Laut merupakan wilayah kerja dari Dinas Kesehatan Banggai Laut. Peneliti memilih tempat penelitian di Kabupaten Banggai Laut karena salah satu kabupaten yang masih menjadi lokus stunting walaupun dari tahun sebelumnya sudah ada penurunan tetapi hal ini yang merupakan persoalan yang harus diseriusi agar prevalensi stunting terkhususnya di Kabupaten Banggai Laut bisa teratasi dan sesuai dengan Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 yaitu target penurunan stunting harus mencapai 14% pada tahun 2024.

Upaya penanganan stunting dilakukan dengan mengoptimalkan peran pemerintah secara lintas OPD, kecamatan dan pemerintah desa/lurah agar terjadi percepatan pencegahan dan penurunan stunting. Kebijakan khusus penanganan stunting di dilakukan melalui Peraturan Bupati Banggai Laut, Nomor 20 Tahun 2022 Tentang percepatan penurunan stunting terintegrasi di Kabupaten Banggai Laut dengan tujuan Perbaikan pola konsumsi, Perbaikan Perilaku sadar gizi, Peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi, dan Peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi dengan sasaran Remaja putri, wanita usia subur, ibu hamil, ibu menyusui, anak dibawah usia 6 bulan dan anak usia 7 – 23 bulan.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga terlibat dalam implementasi pencegahan dan penurunan stunting melalui program pemberian benih sayuran dan anakan kelor. Dinas Pendidikan dan kebudayaan menyelenggarakan program kerja untuk mendukung upaya pencegahan dan penurunan stunting mulai dari tingkat PAUD hingga tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dinas Sosial melakukan pendataan kepada masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat miskin di Kabupaten Banggai Laut baik itu yang terdampak stunting ataupun yang mengalami kemiskinan ekstrim, sehingga data ini dapat digunakan untuk pemberian bantuan. Kegiatan intervensi gizi sensitif

di tingkat Desa dilakukan oleh Kader Posyandu, Bidan Desa, PL KB dan juga tokoh-tokoh agama yang dilibatkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait stunting dan upaya pencegahan stunting.

Kesuksesan program pencegahan stunting dapat menjadi ukuran keberhasilan program pembangunan kesehatan. Suatu program atau kegiatan dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana dan dapat memberikan dampak, hasil atau manfaat yang diinginkan. Sama halnya dengan program pencegahan stunting, dapat dikatakan efektif apabila dapat mencegah stunting itu sendiri.

Berdasarkan hasil observasi awal, peneliti menemukan beberapa indikasi yang mengarah pada belum optimalnya efektivitas program Stunting dalam upaya mencegah timbulnya penderita stunting di Kabupaten Banggai Laut khususnya Banggai Selatan, yaitu dari masyarakat sendiri yang tidak mengindahkan program yang dijalankan oleh pemerintah, masih rendahnya pemahaman ibu mengenai Kesehatan dan Gizi sebelum dan pada maha kehamilan. Bukan hanya faktor kualitas masyarakat yang rendah dan perekonomian masyarakat yang masih bergantung dengan bantuan pemerintah. Karena program yang dijalankan ditujukan langsung kepada masyarakat, hasilnya menunjukkan bahwa faktor hambatan ini dapat merusak faktor pendukung karena faktor hambatan berasal dari masyarakatnya sendiri. Masyarakat tidak memiliki kesadaran sendiri untuk menjaga masa depan anak yang mungkin berpengaruh dalam perkembangan dan pendidikan sang anak.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, karena menggambarkan secara tepat mengenai keadaan atau realita yang terjadi didalam masyarakat (Sari et al., 2022). Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Jadi, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tehnik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi (Jailani, 2023). Sumber data di ambil dari informan yang berjumlah 17 orang secara purposive sampling. Teknik analisa data dengan data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan conclusion drawing/verification(penarikan kesimpulan dan verifikasi).

PEMBAHASAN

Implementasi Program Stunting di Kabupaten Banggai Laut (Studi Kasus di Kecamatan Banggai Selatan) yang mana dikaji berdasarkan beberapa macam variable implementasi program stunting dari Pedoman Pelaksana Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/Kota tahun 2018, teori Edward III dapat digunakan untuk menganalisis keberhasilan Implementasi program stunting dari Pedoman Pelaksana Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/Kota tahun 2018 sebagai berikut:

1. Analaisi Situasi Program Penurunan Stunting

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan terkait dengan Fokus dan Sub Fokus penelitian ditemukan bahwa, proses Analisis Situasi Program Penurunan Stunting di Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut dilakukan dengan mengidentifikasi sebaran prevalensi stunting. Identifikasi ini dilakukan dengan cara menganalisis penyebab terjadinya masalah stunting di masyarakat dan melihat jumlah sebaran prevalensi stunting di Kecamatan melalui kegiatan posyandu yang dilakukan oleh Kader-kader di masing-masing Desa di Puskesmas dan juga Dinas Kesehatan Banggai Laut. Selain melakukan identifikasi dengan mendata jumlah anak penderita

stunting pihak terkait juga melakukan survey dan analisis untuk melihat penyebab utama terjadinya masalah tersebut.

Kaitan temuan penelitian di atas dengan Teori Edward III (dalam Rosman & Mozin, 2018) tentang keberhasilan implementasi program, dalam implementasi program penurunan stunting, komunikasi yang baik antara berbagai pemangku kepentingan, seperti kader posyandu, Puskesmas, dan Dinas Kesehatan Banggai Laut, sangat penting. Analisis Situasi di Kecamatan Banggai Selatan memerlukan komunikasi efektif untuk mengoordinasikan pengumpulan data sebaran prevalensi stunting, penyebabnya, serta hasil survei yang dilakukan. Kader posyandu sebagai pelaksana di lapangan harus mendapatkan informasi yang jelas mengenai cara mendata anak penderita stunting dan menyampaikan laporan kepada dinas terkait. Tanpa komunikasi yang baik, data yang dikumpulkan bisa tidak akurat, sehingga berisiko menghambat efektivitas intervensi.

Keberhasilan program sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya, baik dalam bentuk tenaga kerja, fasilitas kesehatan, maupun sistem pencatatan data. Pelaksanaan survei dan analisis penyebab stunting di Kecamatan Banggai Selatan membutuhkan tenaga kesehatan yang kompeten serta kader posyandu yang terlatih dalam mendata anak penderita stunting dan mengidentifikasi faktor penyebab. Dinas Kesehatan dan Puskesmas memerlukan peralatan dan metode survei yang valid agar hasil analisis situasi benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat. Jika sumber daya seperti tenaga kesehatan, kader, atau teknologi pendataan tidak memadai, maka analisis situasi bisa menjadi kurang akurat dan berisiko menghasilkan kebijakan yang tidak tepat sasaran. Disposisi (Sikap Pelaksana), Faktor ini mencerminkan tingkat komitmen, pemahaman, dan kesungguhan para pelaksana program dalam menjalankan kebijakan. Jika kader posyandu, tenaga kesehatan di Puskesmas, dan pejabat Dinas Kesehatan memiliki sikap yang positif dan memahami pentingnya identifikasi sebaran prevalensi stunting, mereka akan lebih teliti dalam mendata dan menganalisis penyebab utama masalah stunting di Kecamatan Banggai Selatan. Sebaliknya, jika ada ketidakpedulian atau kurangnya pemahaman, maka data yang dikumpulkan bisa tidak akurat atau bahkan tidak diperbarui, sehingga menghambat efektivitas intervensi.

Implementasi program memerlukan struktur birokrasi yang jelas, termasuk mekanisme kerja yang terorganisir antara Puskesmas, Dinas Kesehatan, dan kader posyandu. Dalam kasus Banggai Selatan, struktur birokrasi yang efektif memungkinkan kader posyandu untuk mengumpulkan data dari desa-desa, kemudian menyampaikannya ke Puskesmas dan Dinas Kesehatan untuk dianalisis lebih lanjut. Jika struktur birokrasi terlalu kompleks atau kurang terkoordinasi, proses identifikasi dan survei bisa berjalan lambat atau tidak efektif, yang akhirnya menghambat implementasi intervensi penurunan stunting.

Berdasarkan hasil analisis dan survey yang dilakukan ditemukan bahwa penyebab utama tingginya angka stunting di Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut adalah masih banyak terjadinya pernikahan dini yang artinya reproduksi perempuan masih belum siap untuk melahirkan generasi serta pendidikan orang tua yang tidak terselesaikan sehingga menyebabkan pengetahuan mengenai pola hidup sehat, asupan gizi untuk ibu hamil dan bayi itu masih kurang sehingga dapat berdampak pada pertumbuhan bayi. Selain itu juga berdampak pada cara pengasuhan ibu terhadap anak akibat kurangnya pengetahuan orang tua. Kemudian penyebab lainnya yaitu pola makan dan pola hidup sehat yang belum diterapkan oleh masyarakat Di Kecamatan Banggai Selatan serta pengetahuan masyarakat mengenai program ini maupun stunting.

2. Penyusunan Rencana Kegiatan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan terkait penyusunan rencana kegiatan di Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut ini sudah dilaksanakan sesuai dengan Dalam peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 20 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Banggai Laut. Proses ini diawali dengan melakukan analisis situasi. Hasil dari analisis tersebut akan dijadikan dasar pembuatan rencana kegiatan yang mencakup intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif guna mengatasi masalah yang ditemukan dalam hal ini permasalahan mengenai stunting. Implementasi program Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut ini dilaksanakan melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Intervensi ini dilakukan guna mencegah peningkatan jumlah stunting di Desa serta untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat bebas stunting. Adapun program maupun kegiatan yang dilakukan di Desa Kecamatan Banggai Selatan mencakup dua intervensi tersebut yakni untuk intervensi gizi spesifik terdiri dari program kegiatan seperti pengecekan pertumbuhan anak setiap tiga kali dalam sebulan, Pemberian Makanan Tambahan (PMT), pemberian beras fortifit, posyandu, Pemberian Tablet Tambah Darah kepada remaja putri, Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) seperti kesehatan ibu dan anak (KIA), pelayanan dan konsultasi gizi, promosi kesehatan, survei kesehatan, kesehatan lingkungan, dan imunisasi. Kemudian untuk intervensi gizi sensitif yakni penyediaan air bersih dan sanitasi, penyediaan jaminan sosial, akses pangan bergizi seperti pemberian bantuan pangan non-tunai (BPNT), Program Keluarga Berencana (KB), layanan PAUD, sosialisasi, kelas balita serta edukasi.

Kaitan temuan penelitian di atas dengan Teori Edward III (dalam Rosman & Mozin, 2018) dengan Proses Penyusunan Rencana Kegiatan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 20 Tahun 2022, Komunikasi yang efektif tampak dalam proses analisis situasi yang menjadi dasar penyusunan rencana kegiatan, memastikan bahwa masalah utama terkait stunting dapat teridentifikasi dengan baik. Penyebarluasan informasi melalui sosialisasi dan edukasi di tingkat desa juga menunjukkan implementasi komunikasi yang baik dalam mendukung intervensi gizi spesifik dan sensitif. Keberhasilan implementasi rencana kegiatan bergantung pada ketersediaan sumber daya yang mencakup tenaga kesehatan, anggaran, sarana prasarana, serta dukungan masyarakat Disposisi (Sikap Pelaksana) Keberhasilan program ini juga ditentukan oleh komitmen dan kesiapan para pelaksana, termasuk pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan aparat desa. Jika pelaksana memiliki pemahaman yang baik dan kepedulian tinggi terhadap isu stunting, maka intervensi yang dirancang dalam rencana kegiatan dapat berjalan optimal. Penyusunan rencana kegiatan di Kecamatan Banggai Selatan melibatkan Pemerintahan Desa, Puskesmas dan juga masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Sebelum melakukan pembahasan di Musrenbang di masing-masing Desa pihak- pihak terkait awalnya akan menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta membuat jadwal pelaksanaan dari kegiatan- kegiatan yang akan dilaksanakan nanti.

Penyusunan rencana kegiatan dapat disimpulkan bahwa tahapan ini sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada tetapi masih belum bisa dikatakan maksimal karena dalam pelaksanaan program maupun kegiatan dari dua intervensi ini masih terdapat permasalahan, yakni masih kurangnya edukasi mengenai kesehatan reproduksi bagi remaja, kurangnya edukasi dari pemerintah desa dalam rangka mencegah pernikahan dini, kurangnya program pemerintah desa dalam membatasi pernikahan dini serta masih kurangnya monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program kegiatan, kemudian juga

masih rendahnya minat masyarakat dalam mengikuti sosialisasi dan edukasi yang diberikan oleh pemerintah serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti kegiatan posyandu dan kegiatan-kegiatan.

3. Pembinaan Kader Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan terkait Pembinaan Kader Pembangunan di Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Banggai Laut No. 20 tahun 2022 tentang peran Desa dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi. Dimana Desa Tolokibit, Desa Bentean dan Desa Matanga Kecamatan Banggai Selatan memiliki masing-masing Kader Pembangunan Manusia yang dipilih melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Kader pembangunan manusia ini dibentuk mulai dari awal pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Banggai Laut yaitu pada tahun 2021. Dalam melaksanakan tugas, Kader Pembangunan Manusia harus mendapatkan penguatan kapasitas. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pembinaan guna meningkatkan kapasitas kader dan pengetahuan mereka dalam melaksanakan tugas. Sesuai dengan Peraturan Bupati Banggai Laut No. 20 tahun 2022 tentang peran Desa dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi bahwa Pembinaan Kader Pembangunan Manusia di Desa dapat berupa pemberian insentif maupun pemberian pelatihan dan penguatan kapasitas KPM. Sejalan dengan ini Kader Pembangunan Manusia di masing-masing desa di Kecamatan Banggai Selatan juga mengikuti pembinaan tersebut. Waktu pembinaan KPM ini dilakukan setiap bulan dan materi yang diberikan dalam pembinaan ini adalah tentang bagaimana cara penurunan angka stunting. Di Kecamatan Banggai Selatan sendiri selain Kader Pembangunan Manusia ada juga kader-kader lainnya yang mengikuti pembinaan yakni kader-kader inti, tenaga perawat desa, tenaga gizi desa dan Sub-PKKBD yang juga merupakan pelaksana program pencegahan dan penanggulangan stunting di Desa. Keterkaitan penelitian ini dengan hasil penelitian Umi Nur Qomariyah, dkk (2021) bahwa dalam tahapan pembinaan kader pembangunan manusia sudah dilakukan dengan baik. Pembinaan Kader merupakan salah satu langkah dalam percepatan pencegahan stunting dengan menyasar langsung pada agen penurunan stunting terdekat dengan sasaran yaitu kader pembangunan manusia. Dengan adanya konvergensi dengan pembinaan KPM maka dapat meningkatkan peran aktif desa/ kelurahan dalam penurunan angka stunting pada balita.

Kaitan temuan penelitian di atas dengan Teori Edward III (dalam Rosman & Mozin, 2018) dalam Pembinaan Kader Manusia, Komunikasi dalam Implementasi kebijakan ini diawali dengan musyawarah desa untuk memilih KPM, yang menunjukkan adanya komunikasi yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat. Pembinaan KPM yang dilakukan setiap bulan, dengan materi tentang cara menurunkan angka stunting, mencerminkan upaya komunikasi yang kontinu dalam meningkatkan kapasitas kader. Koordinasi dengan kader inti, tenaga perawat desa, tenaga gizi desa, dan Sub-PKKBD juga menunjukkan adanya komunikasi yang luas untuk memastikan intervensi berjalan efektif.

Sumber Daya Pembinaan KPM yang mencakup pelatihan dan penguatan kapasitas menunjukkan adanya dukungan sumber daya yang cukup dalam meningkatkan efektivitas kader di lapangan. Pemberian insentif kepada KPM sebagai bentuk penghargaan atas kinerjanya juga menjadi bagian dari alokasi sumber daya yang penting dalam mendukung implementasi kebijakan ini. Keterlibatan kader-kader lainnya di desa memperlihatkan optimalisasi sumber daya manusia dalam program pencegahan dan penanggulangan stunting.

Disposisi (Sikap Pelaksana) Pembentukan KPM sejak awal program pencegahan dan penanggulangan stunting pada tahun 2021 menunjukkan adanya komitmen dari pemerintah desa dan para kader dalam menjalankan kebijakan ini. Keikutsertaan kader dalam pembinaan rutin menunjukkan bahwa mereka memiliki motivasi dan kesungguhan dalam memahami dan menjalankan perannya sebagai agen penurunan stunting. Sejalan dengan penelitian Umi Nur Qomariyah, dkk (2021), pembinaan KPM telah dilakukan dengan baik dan menjadi langkah strategis dalam percepatan pencegahan stunting.

Struktur Birokrasi KPM di Desa Tolokibit, Desa Bentean, dan Desa Matanga dipilih melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa, menunjukkan adanya mekanisme birokrasi yang formal dan jelas dalam pengelolaan kader. Peraturan Bupati Banggai Laut No. 20 Tahun 2022 menjadi dasar hukum yang memperkuat kewenangan desa dalam intervensi stunting, sehingga program memiliki pedoman yang jelas untuk dijalankan. Konvergensi dengan pembinaan KPM juga memastikan adanya sinergi antara desa/kelurahan dan kader dalam menurunkan angka stunting pada balita.

Berdasarkan uraian sebelumnya terkait dengan pembinaan Kader Pembangunan Manusia dapat disimpulkan bahwa tahapan ini sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Bahkan pembinaan yang dilakukan bukan hanya untuk KPM saja tetapi kader-kader lain juga dilakukan pembinaan. Pembinaan Kader ini harus terus dilakukan seperti dengan melakukan pelatihan, pembimbingan ataupun kegiatan-kegiatan lain yang ada hubungannya dengan program pencegahan dan penanggulangan stunting agar dapat meningkatkan kapasitas pengetahuan dan kemampuan Kader dalam melaksanakan tugas.

4. Sistem Manajemen Data Stunting

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan terkait Sistem Manajemen Data Stunting di Kecamatan Banggai Selatan sudah dijalankan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten/Kota tahun 2018. Dimana pengelolaan data stunting di Desa dilakukan oleh Kader pembangunan Manusia dan pihak Puskesmas. Pengelolaan data stunting oleh Kader Pembangunan Manusia dilakukan dengan menggunakan aplikasi khusus yaitu aplikasi e-Human Development Worker (eHDW). Aplikasi ini merupakan aplikasi secara online yang hanya dapat diakses oleh Kader Pembangunan Manusia. Aplikasi ehdw merupakan aplikasi yang dikelola oleh Direktorat Pelayanan Sosial Dasar, Ditjen PPMD, Kementerian Desa PDTT. Aplikasi ini dikembangkan untuk membantu Desa dan KPM dalam memfasilitasi konvergensi pencegahan stunting di Desa sebagai solusi digital yang mempermudah Desa dan KPM dalam pengumpulan data, pemantauan, pencatatan dan pelaporan. Kemudian untuk pengelolaan data stunting yang dilakukan oleh pihak Puskesmas dan Dinas Kesehatan juga menggunakan aplikasi khusus dalam menginput data stunting yakni aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM). Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah dalam mengamati permasalahan gizi di wilayah masing-masing untuk selanjutnya mengambil keputusan terhadap dan tindakan apa yang akan dilakukan. Untuk data yang diinput di kedua aplikasi ini mencakup data-data dari setiap indikator mulai dari data stunting, status gizi, data pertumbuhan dan berat badan serta tinggi badan anak, ibu hamil sampai dengan cakupan intervensi gizi spesifik dan sensitif.

Kaitan temuan penelitian di atas dengan Teori Edward III (dalam Rosman & Mozin, 2018) tentang keberhasilan implementasi program, dalam implementasi program penurunan stunting, Sistem manajemen data stunting di Kecamatan Banggai Selatan melibatkan Kader Pembangunan Manusia (KPM), Puskesmas, dan Dinas Kesehatan, yang masing-masing bertanggung jawab

dalam pengumpulan dan pelaporan data. Penggunaan aplikasi e-HDW dan e-PPGBM memperlancar komunikasi antara berbagai pihak dengan menyediakan data yang terintegrasi dan mudah diakses. Data yang diperoleh melalui sistem ini memungkinkan koordinasi yang lebih baik dalam merancang dan mengimplementasikan intervensi penurunan stunting.

Keberhasilan sistem ini bergantung pada tenaga KPM dan petugas kesehatan yang bertugas mengelola dan menginput data. Diperlukan pelatihan bagi pengguna aplikasi e-HDW dan e-PPGBM, agar mereka dapat mengoperasikan sistem dengan benar dan memastikan data yang dikumpulkan akurat. Infrastruktur teknologi, seperti akses internet dan perangkat elektronik yang memadai, juga menjadi faktor penting dalam keberlanjutan sistem ini.

Disposisi (Sikap Pelaksana) dalam komitmen dan pemahaman KPM, tenaga kesehatan, dan pemerintah desa terhadap pentingnya pengelolaan data menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi. Jika para pelaksana memiliki kesadaran tinggi tentang urgensi pemantauan stunting, maka mereka akan lebih disiplin dalam menginput dan memperbarui data secara rutin. Dukungan dari pemerintah daerah dan pusat juga diperlukan agar para pelaksana tetap termotivasi dalam menjalankan sistem ini.

Dalam Struktur Birokrasi Penggunaan dua aplikasi resmi (e-HDW dan e-PPGBM) menunjukkan bahwa pengelolaan data telah memiliki struktur yang jelas dan terorganisir. Aplikasi e-HDW dikelola oleh Kementerian Desa PDTT, sedangkan e-PPGBM dikelola oleh Dinas Kesehatan, yang menunjukkan adanya koordinasi antara sektor kesehatan dan pembangunan desa. Dengan adanya regulasi yang mengatur peran KPM, Puskesmas, dan pemerintah daerah, sistem ini dapat berjalan secara sistematis sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian sebelumnya terkait dengan sistem manajemen data stunting dapat disimpulkan bahwa pengelolaan data stunting sudah dilakukan dengan baik oleh Pemerintahan Desa dan juga Puskesmas. Namun, dengan keadaan petugas penginputan data yang masih sedikit perlu adanya peningkatan kuantitas petugas pengelolaan data dan peningkatan cakupan penggunaan aplikasi penginputan data serta peningkatan kapasitas petugas terkait surveilans agar pelaksanaan program akan lebih optimal.

5. Pengukuran dan Publikasi Angka Stunting

Berdasarkan temuan peneliti dilapangan bahwa untuk pengukuran stunting yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Desa Tolokibit, Desa Bentean dan Desa Matanga Kecamatan Banggai Selatan itu hanya berdasarkan pada tiga indikator yakni Berat Badan menurut Umur (BB/U), Panjang/Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U) dan Berat Badan menurut Panjang/Tinggi Badan (BB/PB atau BB/TB). Pengukuran Indeks Massa Tubuh menurut Umur tidak dilakukan karena IMT adalah penilaian status gizi untuk usia dewasa dengan melakukan perbandingan berat badan dalam kilogram dengan tinggi badan dalam meter kuadrat. Sehingga perhitungan IMT ini dinilai kurang akurat dalam mengukur status gizi anak karena berat dan tinggi badan di usia anak-anak cenderung berubah dengan sangat cepat. Untuk publikasi angka stunting di masing-masing Desa di Kecamatan Banggai Selatan dilakukan secara berjenjang mulai dari data Puskesmas kemudian di Laporkan ke Pihak Dinas Kesehatan. Pelaporannya ada yang menggunakan aplikasi dengan cara menginput data di aplikasi tersebut dan juga melakukan klarifikasi secara langsung ke Dinas Kesehatan.

Kaitan temuan penelitian di atas dengan Teori Edward III (dalam Rosman & Mozin, 2018) tentang keberhasilan implementasi program, dalam implementasi program penurunan stunting, dalam komunikasi Pengukuran stunting dilakukan oleh tenaga kesehatan berdasarkan tiga indikator utama: BB/U, PB/U (TB/U), dan BB/PB (BB/TB). Keputusan untuk tidak menggunakan

Indeks Massa Tubuh (IMT/U) menunjukkan adanya komunikasi dan pemahaman di tingkat pelaksana bahwa metode ini kurang akurat untuk anak-anak. Publikasi data stunting dilakukan berjenjang, dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan, melalui kombinasi input data digital dan klarifikasi langsung. Hal ini mencerminkan pentingnya komunikasi dalam memastikan akurasi dan validitas data.

Tenaga kesehatan yang bertugas di desa berperan dalam mengukur dan melaporkan data stunting, tetapi efektivitasnya bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia dan alat pengukuran yang memadai. Aplikasi digital untuk input data membantu proses pelaporan, tetapi memerlukan pelatihan bagi tenaga kesehatan agar data yang dimasukkan akurat dan dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan. Infrastruktur pendukung seperti akses internet dan perangkat teknologi juga menjadi faktor penting dalam memastikan kelancaran sistem pelaporan. Disposisi (Sikap Pelaksana) Tenaga kesehatan memiliki pemahaman dan komitmen untuk menggunakan indikator yang lebih relevan dalam mengukur stunting, sehingga tidak menggunakan IMT/U. Motivasi dan kesadaran petugas kesehatan dalam menginput dan melaporkan data secara akurat sangat penting untuk memastikan efektivitas program pencegahan stunting.

Pelaporan data dilakukan secara berjenjang dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan, yang menunjukkan adanya struktur birokrasi yang jelas dalam pengelolaan data stunting. Penggunaan aplikasi digital untuk input data mencerminkan adanya mekanisme birokrasi yang lebih modern dan efisien, meskipun masih dikombinasikan dengan metode manual (klarifikasi langsung). Adanya kebijakan dan pedoman yang mengatur standar pengukuran dan pelaporan membantu memastikan keseragaman dalam implementasi program pencegahan stunting.

Berdasarkan uraian sebelumnya terkait dengan pengukuran dan publikasi angka stunting dapat disimpulkan bahwa pengukuran dan publikasi angka stunting telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan aturan yang ada. Pelaksana dalam mengukur angka stunting di Kecamatan Banggai Selatan dilakukan oleh tenaga kesehatan di desa dan Puskesmas. Dan dalam hal publikasi stunting sudah dijalankan dengan baik oleh KPM dan juga pihak Puskesmas dengan melaporkan data langsung ke Dinas Kesehatan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya yang terkait dengan fokus dan sub fokus penelitian maka dapat ditarik kesimpulan peneliti sebagai berikut:

1) Analisis Situasi Program Penurunan Stunting

Analisis Situasi Program Penurunan Stunting dimana hasil analisis situasi menunjukkan penyebab utama tingginya angka stunting di Kecamatan Banggai Selatan adalah masih tingginya angka pernikahan dini, kurangnya penerapan pola hidup sehat oleh masyarakat serta pengetahuan masyarakat mengenai program dan dampak serta tata cara pencegahan stunting masih sangat kurang.

2) Penyusunan Rencana Kegiatan

Penyusunan Rencana Kegiatan yang menunjukkan bahwa pelaksanaannya sudah dilakukan dengan baik dan juga melibatkan masyarakat. Tetapi dalam pelaksanaan program kegiatan yang mencakup dua intervensi masih terdapat kendala yaitu masih kurangnya edukasi mengenai kesehatan reproduksi bagi remaja, kurangnya edukasi oleh pemerintah desa dalam rangka mencegah pernikahan dini, kurangnya program pemerintah desa dalam membatasi pernikahan

dini serta masih kurangnya monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program kegiatan, kemudian juga masih rendahnya minat masyarakat dalam mengikuti sosialisasi dan edukasi yang diberikan oleh pemerintah serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti kegiatan posyandu dan kegiatan-kegiatan lainnya.

3) **Pembinaan Kader Pembangunan Manusia**

Pembinaan Kader Pembangunan Manusia dimana pembinaan ini harus terus dilakukan dengan melakukan pelatihan maupun kegiatan- kegiatan lain yang ada hubungannya dengan program untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan kemampuan KPM dalam menjalankan tugas.

4) **Sistem Manajemen Data Stunting**

Sistem Manajemen Data Stunting yang dimana sudah dilakukan dengan baik. Namun, dengan keadaan petugas penginputan data yang masih sedikit perlu adanya peningkatan kuantitas petugas pengelolaan data dan peningkatan cakupan penggunaan aplikasi penginputan data agar pelaksanaan program akan lebih optimal.

5) **Pengukuran dan Publikasi Angka Stunting**

Pengukuran dan Publikasi Angka Stunting dimana tahap ini sudah dilakukan dengan baik oleh Pemerintahan Desa dan Puskesmas. Dan perlu dilakukan setiap bulannya guna melihat perkembangan stunting di masing-masing Desa yang ada di Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut.

DAFTAR PUSTAKA

Djafar, N. A., Mozin, S. Y., & Ilato, R. (2024). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Yosonegoro Kabupaten Gorontalo. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2), 176–191.

Sari, I. N., Lestari, L. P., Kusuma, D. W., Mafulah, S., Brata, D. P. N., Iffah, J. D. N., Widiatsih, A., Utomo, E. S., Maghfur, I., & Sofiyana, M. S. (2022). Metode penelitian kualitatif. Unisma Press.

Regulasi:

Perbup Banggai Laut No. 20 Tahun 2022 tentang Peran Desa dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi

Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting